

URGENSI PENGATURAN KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA

Nama: Muhammad Fahmi Hadadi
Jurusan/Program Studi: Hukum/Magister Kenotariatan
Pembimbing: Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Permasalahan terkait dengan kepailitan lintas batas negara adalah mengenai eksekusi harta pailit. UU KPKPU saat ini tidak memberikan ruang bagi berlakunya ketentuan kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*). Hambatan yang terjadi terkait dengan penyelesaian kepailitan lintas batas negara adalah mengenai *Recognition* atau Pengakuan terhadap putusan Pengadilan asing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai urgensi pengaturan kepailitan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan urgensi pengaturan kepailitan lintas batas negara dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan lintas batas merupakan suatu keadaan atau kasus kepailitan yang melintasi batas territorial negara dan unsur asing di dalamnya baik kreditur maupun debiturnya. Putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Begitupula Putusan hakim Indonesia juga tidak dapat langsung dilaksanakan di negara lain sehingga putusan pailit hakim Indonesia tidak dapat mengeksekusi harta debitur pailit yang berada diluar negeri begitupula dengan putusan pengadilan asing. Solusi yang memungkinkan setiap negara untuk menghadapi isu kepailitan lintas batas yang semakin berkembang seiring berkembangnya globalisasi transaksi bisnis internasional melalui upaya menciptakan suatu keseragaman hukum kepailitan berstandar internasional dengan cara melengkapi hukum kepailitannya secara modern, dinamis, dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan lintas batas.

Kata Kunci: Kepailitan, Lintas Batas, KPKPU

THE URGENCY OF CROSS-BORDER ABILITIES ARRANGEMENTS

Nama: Muhammad Fahmi Hadadi
Jurusan/Program Studi: Hukum/Magister Kenotariatan
Pembimbing: Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum

ABSTRACT

Problems related to cross-border bankruptcy are regarding the execution of bankruptcy assets. The KPKPU Law currently does not provide room for cross-border insolvency provisions to be enforced. Obstacles that occur related to cross-border bankruptcy settlements are regarding recognition or acknowledgment of foreign court decisions. This research was conducted with the aim to find out more about the urgency of cross-border bankruptcy arrangements. The research method used in this study is a normative legal research approach. The research was carried out by examining secondary data to analyze legal norms related to the urgency of cross-border bankruptcy arrangements using a statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study show that cross-border bankruptcy is a condition or bankruptcy case that crosses national territorial boundaries and foreign elements in it, both creditors and debtors. Decisions of foreign judges cannot be directly implemented in Indonesia. Likewise, the decisions of Indonesian judges cannot be directly implemented in other countries so that the bankruptcy decisions of Indonesian judges cannot execute the assets of bankrupt debtors who are abroad as well as foreign court decisions. A solution that allows each country to deal with cross-border bankruptcy issues that are increasingly developing along with the development of globalization of international business transactions through efforts to create a uniformity of international standard bankruptcy law by complementing its bankruptcy law in a modern, dynamic and fair manner in resolving cross-border bankruptcy cases.

Keywords: Bankruptcy, Cross Border, PKPU